

**Nomor : 001/HM/SP/XII/2025**  
**Tanggal : 9 Desember 2025**

Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) merupakan mekanisme yang dilaksanakan secara terus-menerus oleh KPU untuk memastikan daftar pemilih selalu mutakhir, akurat, dan sesuai dengan perkembangan data kependudukan. Proses ini mencakup pencatatan pemilih baru, pemilih tidak memenuhi syarat (TMS), perubahan identitas, serta perpindahan domisili penduduk.

Sebagai lembaga yang memiliki kewenangan pengawasan penyelenggaraan pemilu, Bawaslu berkewajiban memastikan bahwa seluruh proses PDPB dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan, berlandaskan prinsip akurasi, transparansi, dan akuntabilitas. Pengawasan ini penting dilakukan mengingat daftar pemilih merupakan salah satu instrumen krusial dalam penyelenggaraan pemilu, karena menjadi dasar penentuan jumlah TPS, logistik pemilu, dan memastikan terpenuhinya hak pilih masyarakat.

Memasuki Triwulan IV Tahun 2025, pengawasan terhadap PDPB menjadi signifikan karena data yang ditetapkan dalam periode ini akan menjadi patokan awal bagi penyusunan daftar pemilih pada tahapan pemilu/pemilihan berikutnya. Pada tahap ini, Bawaslu menaruh perhatian khusus pada:

1. Kesesuaian data hasil rekap dengan kondisi faktual di lapangan, untuk menghindari potensi data ganda, pemilih tidak memenuhi syarat, atau pemilih yang belum terdaftar.
2. Kelengkapan data perubahan, termasuk pemilih baru, pemilih TMS, perpindahan masuk/keluar, serta data pemilih yang mengalami perubahan identitas.
3. Pentingnya koordinasi antar-stakeholder, seperti KPU, Disdukcapil, pemerintah kecamatan/desa, dan instansi terkait lainnya, dalam penyediaan data kependudukan yang akurat.
4. Keterbukaan informasi dan akuntabilitas proses, agar masyarakat dapat mengawasi dan memastikan hak pilih mereka terjamin.

Dengan melakukan pengawasan pada pleno rekapitulasi PDPB Triwulan IV, Bawaslu berupaya memastikan bahwa daftar pemilih yang dihasilkan benar-benar mutakhir, valid, dan dapat digunakan sebagai dasar kuat untuk tahapan pemutakhiran data pemilih pada pemilu yang akan datang. Hasil pengawasan ini juga menjadi bagian dari rekomendasi Bawaslu kepada KPU sebagai langkah perbaikan dalam peningkatan kualitas daftar pemilih secara berkelanjutan.

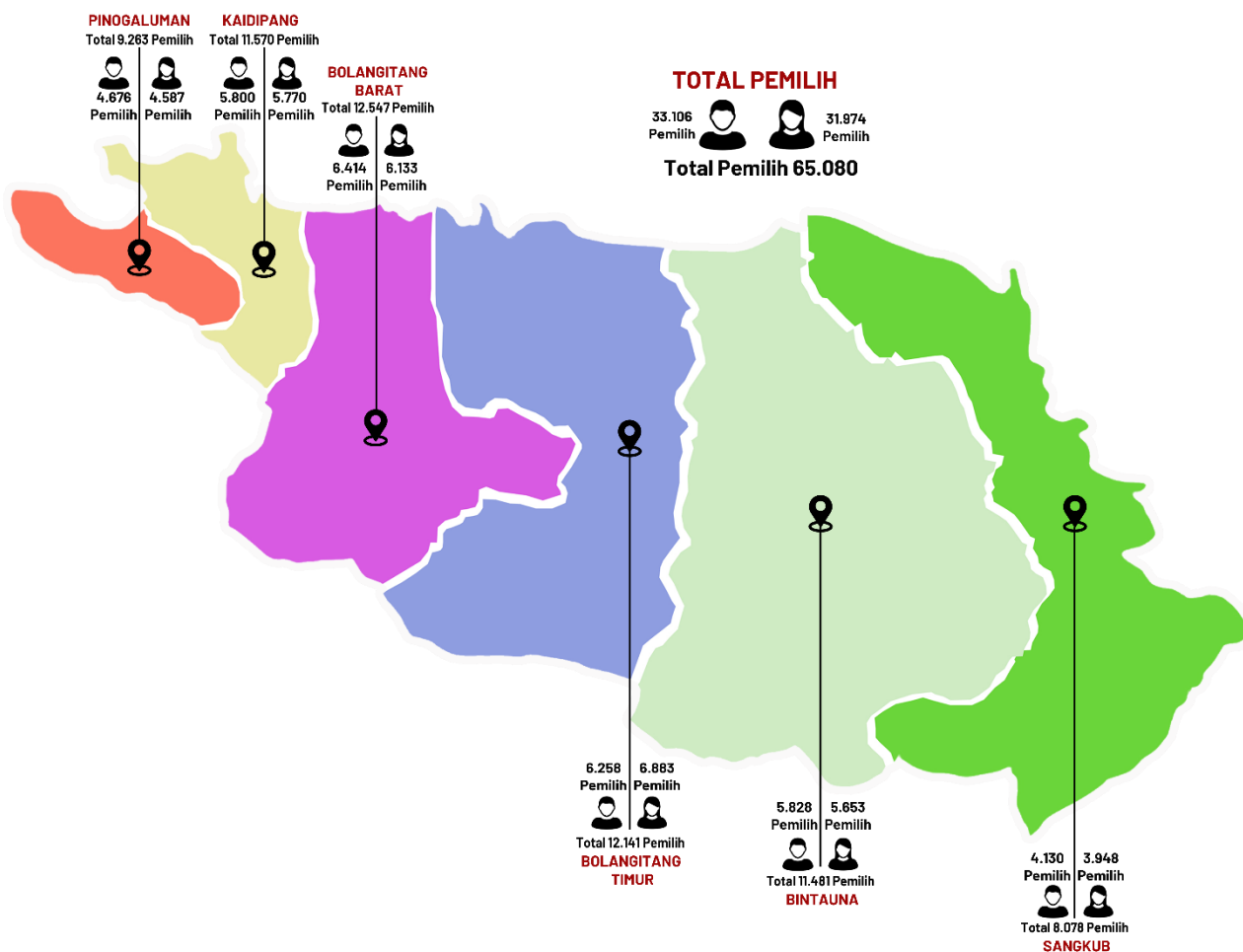


## A. Pengawasan Pleno PDPB Triwulan IV

**Boltara**, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Utara melaksanakan pengawasan langsung terhadap pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan IV Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Utara pada Senin, 08 November 2025 bertempat di Kantor KPU Bolmut.

Kegiatan ini menjadi bagian penting dalam rangka memastikan proses pemutakhiran data pemilih berlangsung secara akurat, transparan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengawasan tahapan penyelenggaraan pemilu, Bawaslu Bolmut turut hadir untuk melakukan pencermatan menyeluruh terhadap tahapan pleno, mulai dari penyampaian hasil rekap oleh KPU hingga proses verifikasi data yang ditampilkan dalam dokumen rekapitulasi.

Pada pleno tersebut, KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Utara menyampaikan hasil pemutakhiran data pemilih berdasarkan laporan yang masuk dari seluruh wilayah kecamatan. Adapun hasil PDPB Triwulan IV Tahun 2025 yang ditetapkan dalam pleno adalah sebagai berikut:



Data ini mencerminkan akumulasi proses pemutakhiran yang dilakukan sepanjang Triwulan IV, meliputi penambahan pemilih baru, penghapusan pemilih tidak memenuhi syarat (TMS), serta perpindahan pemilih masuk dan keluar. Ketersediaan data yang akurat menjadi bagian krusial sebagai dasar bagi penyusunan daftar pemilih pada tahapan pemilu selanjutnya.

## B. CATATAN PENGAWASAN

Dalam menjalankan tugas pengawasan, Bawaslu Kabupaten Bolmut menyampaikan sejumlah catatan strategis sebagai upaya memastikan kualitas pemutakhiran data pemilih tetap terjaga.

### 1. *Validitas dan Akurasi Data Pemilih*

Bawaslu menekankan pentingnya menjaga kesesuaian data rekap dengan kondisi faktual di lapangan. Setiap data harus melalui proses verifikasi yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga tidak terjadi ketidaksesuaian antara data administrasi dan fakta kependudukan masyarakat.

### 2. *Kelengkapan Informasi Perubahan Data Pemilih*

Dalam pleno, Bawaslu menyoroti perlunya penyampaian data perubahan pemilih secara lebih rinci, terutama terkait jumlah pemilih baru, pemilih TMS, serta perpindahan pemilih antarwilayah. Kelengkapan informasi ini diperlukan sebagai referensi untuk mengidentifikasi potensi masalah dan perbaikan pada pemutakhiran data berikutnya.

### 3. *PDPB sebagai Dasar Tahapan Pemilu Mendatang*

Bawaslu Bolmut menegaskan bahwa hasil PDPB Triwulan IV Tahun 2025 akan menjadi **patokan dasar** dalam proses penyusunan data pemilih di tahapan pemilu selanjutnya. Oleh karena itu, setiap elemen data harus akurat, konsisten, dan telah melalui proses verifikasi berlapis.

## C. KOMITMEN BAWASLU BOLMUT DALAM PENGAWASAN DATA PEMILIH

Bawaslu Bolmut terus memastikan seluruh tahapan pemutakhiran data pemilih berjalan sesuai ketentuan. Kehadiran Bawaslu dalam pleno ini merupakan bentuk komitmen terhadap transparansi, akuntabilitas, dan integritas proses penyelenggaraan pemilu.

Anggota Bawaslu Bolmut, Abdul Saddam Alamari, S.Kep, memberikan penegasan terkait pentingnya kualitas data pemilih sebagai fondasi awal penyelenggaraan pemilu yang berkualitas. *“Bawaslu Bolmut memastikan setiap proses pemutakhiran data pemilih berjalan sesuai ketentuan dan berbasis fakta. Hasil pleno Triwulan IV ini menjadi rujukan penting bagi tahapan pemilu berikutnya, sehingga kualitas datanya harus benar-benar akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.”*

Lebih lanjut, Bawaslu Bolmut juga mendorong adanya koordinasi yang lebih intensif antara penyelenggara teknis pemilu, pemerintah daerah, serta instansi terkait dalam penyediaan data kependudukan yang mutakhir. Kerja sama yang solid antar-stakeholder dinilai sangat penting untuk meminimalisir potensi permasalahan data pemilih seperti data ganda, pemilih tidak memenuhi syarat, hingga pemilih yang belum terdaftar.



#### **D. PENUTUP**

Melalui kegiatan pengawasan ini, Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Utara menegaskan kembali komitmennya untuk terus berada di garda terdepan dalam memastikan penyelenggaraan pemilu berjalan dengan baik, jujur, dan adil. Bawaslu akan menindaklanjuti hasil pengawasan ini dalam bentuk rekomendasi perbaikan kepada KPU Bolmut sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan.

Bawaslu Bolmut berharap seluruh elemen masyarakat turut mendukung proses pemutakhiran data pemilih dengan memberikan informasi yang benar dan mengambil bagian aktif dalam memastikan hak pilih setiap warga negara dapat terpenuhi dengan baik pada pemilu mendatang.

